PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014





DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2019

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
11.	PROVINSI ACEH (UU Nomor 11 Tahun 2006, sebelumnya bernama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001)	PROVINSI SUMATERA UTARA	Banda Aceh (Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43, sebelumnya bernama Kutaraja)	UU Nomor 24 Tahun 1956	29 Desember 1956
11.01	Kabupaten Aceh Selatan		Tapaktuan	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tengah	Kutacane	UU Nomor 4 Tahun 1974	4 Juni 1974
11.03	Kabupaten Aceh Timur		Idi Rayeuk (PP Nomor 5 Tahun 2007, sebelumnya berkedudukan di Kota Langsa)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.04	Kabupaten Aceh Tengah		Takengon	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.05	Kabupaten Aceh Barat		Meulaboh	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.06	Kabupaten Aceh Besar		Jantho (PP Nomor 35 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Banda Aceh)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.07	Kabupaten Pidie		Sigli	UU Nomor 24 Tahun 1956	29 November 1956
11.08	Kabupaten Aceh Utara		Lhoksukon (PP Nomor 18 Tahun 2003, sebelumnya berkedudukan di Kota Lhokseumawe)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11.09	Kabupaten Simeulue * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Simeulue berdasarkan PP No. 53 Tahun 1996)	Kabupaten Aceh Barat	Sinabang	UU Nomor 48 Tahun 1999	4 Oktober 1999
11.10	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Selatan	Singkil	UU Nomor 14 Tahun 1999	20 April 1999
11.11	Kabupaten Bireuen	Kabupaten Aceh Barat	Bireun	UU Nomor 48 Tahun 1999	4 Oktober 1999
11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten Aceh Selatan	Blangpidie	UU Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002

1

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
11.13	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten Aceh Tenggara	Blangkejeren	UU Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
11.14	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Aceh Barat	Calang	UU Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
11.15	Kabupaten Nagan Raya	Rabupaten Acen Barat	Suka Makmur	UU Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten Aceh Timur	Karang Baru	UU Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
11.17	Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten Aceh Tengah	Simpang Tiga Redelong	UU Nomor 41 Tahun 2003	18 Desember 2003
11.18	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten Pidie	Meureudu	UU Nomor 7 Tahun 2007	2 Januari 2007
11.71	Kota Banda Aceh (Kep. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/43-43, sebelumnya bernama Kutaraja)			UU Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
11.72	Kota Sabang	Kabupaten Aceh Besar		UU Nomor 10 Tahun 1965	14 Juni 1965
11.73	Kota Lhokseumawe ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lhokseumawe berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1986)	Kabupaten Aceh Utara		UU Nomor 2 Tahun 2001	21 Juni 2001
11.74	Kota Langsa ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Langsa berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 1991)	Kabupaten Aceh Timur		UU Nomor 3 Tahun 2001	21 Juni 2001
11.75	Kota Subulussalam	Kabupaten Aceh Singkil		UU Nomor 8 Tahun 2007	2 Januari 2007
12.	PROVINSI SUMATERA UTARA	PROVINSI SUMATERA	Medan	UU Nomor 24 Tahun 1956	29 November 1956
12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah		Pandan (PP Nomor 7 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Sibolga)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.02	Kabupaten Tapanuli Utara		Tarutung	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan		Sipirok	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.04	Kabupaten Nias		Gido	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
			(PP Nomor 30 Tahun 2016, sebelumnya berkedudukan di Kota Gunungsitoli)		

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
12.05	Kabupaten Langkat		Stabat (PP Nomor 5 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Binjai)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.06	Kabupaten Karo		Kabanjahe	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.07	Kabupaten Deli Serdang		Lubuk Pakam (PP Nomor 7 Tahun 1984, sebelumnya berkedudukan di Kota Medan)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.08	Kabupaten Simalungun		Pematang Raya (PP Nomor 35 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Pematang Siantar)	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.09	Kabupaten Asahan		Tanjung Balai	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.10	Kabupaten Labuhanbatu		Rantau Prapat	UU Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
12.11	Kabupaten Dairi	Kabupaten Tapanuli Utara	Sidikalang	UU Nomor 15 Tahun 1964	23 September 1964
12.12	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Tapanun Otara	Balige	UU Nomor 12 Tahun 1998	23 November 1998
12.13	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten Tapanuli Selatan	Panyabungan	UU Nomor 12 Tahun 1998	23 November 1998
12.14	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias	Teluk Dalam	UU Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Dairi	Salak	UU Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dolok Sanggul	UU Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
12.17	Kabupaten Samosir	Kabupaten Toba Samosir	Pangururan	UU Nomor 36 Tahun 2003	18 Desember 2003
12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Deli Serdang	Sei Rampah	UU Nomor 36 Tahun 2003	18 Desember 2003
12.19	Kabupaten Batu Bara	Kabupaten Asahan	Lima Puluh	UU Nomor 5 Tahun 2007	2 Januari 2007
12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupatan Tananuli Calatan	Gunung Tua	UU Nomor 37 Tahun 2007	14 Agustus 2007
12.21	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sibuhuan	UU Nomor 38 Tahun 2007	14 Agustus 2007
12.22	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kabupatan Labubaratan	Kota Pinang	UU Nomor 22 Tahun 2008	21 Juli 2008
12.23	Kab. Labuhanbatu Utara	Kabupaten Labuhanbatu	Aek Kanopan	UU Nomor 23 Tahun 2008	21 Juli 2008

3

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
12.24	Kab. Nias Utara	Kabupaten Nias	Lolofaoso	UU Nomor 45 Tahun 2008	26 November 2008
12.25	Kab. Nias Barat	·	Onolimbu	UU Nomor 46 Tahun 2008	26 November 2008
12.71	Kota Medan			UU Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
12.72	Kota Pematang Siantar			UU Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
12.73	Kota Sibolga			UU Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
12.74	Kota Tanjung Balai			UU Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
12.75	Kota Binjai			UU Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
12.76	Kota Tebing Tinggi			UU Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
12.77	Kota Padang Sidempuan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Padang Sidempuan berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1982)	Kabupaten Tapanuli Selatan		UU Nomor 4 Tahun 2001	21 Juni 2001
12.78	Kota Gunungsitoli	Kabupaten Nias		UU Nomor 47 Tahun 2008	26 November 2008
13.	PROVINSI SUMATERA BARAT	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Padang (PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi)	UU Nomor 61 Tahun 1958	25 uli 1958
13.01	PROVINSI SUMATERA BARAT Kabupaten Pesisir Selatan	PROVINSI SUMATERA TENGAH	(PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota	UU Nomor 61 Tahun 1958 UU Nomor 12 Tahun 1956	25 uli 1958 19 Maret 1956
		PROVINSI SUMATERA TENGAH	(PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi)		
13.01	Kabupaten Pesisir Selatan	PROVINSI SUMATERA TENGAH	(PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi) Painan Aro-Sukarami (PP Nomor 39 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.01 13.02	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung (PP Nomor 25 Tahun 2008, sebelumnya	PROVINSI SUMATERA TENGAH	(PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi) Painan Aro-Sukarami (PP Nomor 39 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Solok)	UU Nomor 12 Tahun 1956 UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956 19 Maret 1956
13.01 13.02 13.03	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung (PP Nomor 25 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung)	PROVINSI SUMATERA TENGAH	(PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi) Painan Aro-Sukarami (PP Nomor 39 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Solok) Sijunjung	UU Nomor 12 Tahun 1956 UU Nomor 12 Tahun 1956 UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956 19 Maret 1956 19 Maret 1956



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4 (PP Nomor 8 Tahun 1998,	5	6
			sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi)		
13.07	Kabupaten Lima Puluh Kota		Sarilamak (PP Nomor 40 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Payakumbuh)	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.08	Kabupaten Pasaman		Lubuk Sikaping	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.09	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Padang Pariaman	Tua Pejat	UU Nomor 49 Tahun 1999	4 Oktober 1999
13.10	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Sijunjung	Pulau Punjung	UU Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
13.11	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok	Padang Aro	UU Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
13.12	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman	Simpang Empat	UU Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
13.71	Kota Padang			UU Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.72	Kota Solok			UU Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.73	Kota Sawahlunto			UU Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.74	Kota Padangpanjang			UU Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.75	Kota Bukittinggi			UU Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.76	Kota Payakumbuh			UU Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
13.77	Kota Pariaman ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Pariaman berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1986)	Kabupaten Padang Pariaman		UU Nomor 12 Tahun 2002	10 April 2002
14.	PROVINSI RIAU	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Pekanbaru - (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/1/44-25, sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang) (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des. 52/4/29-133, sebelumnya bernama Pakanbaru)	UU Nomor 61 Tahun 1958	25 Juli 1958
14.01	Kabupaten Kampar		Kampar	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
14.02	Kabupaten Indragiri Hulu (UU Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Indragiri)		Rengat	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
14.03	Kabupaten Bengkalis		Bengkalis	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
14.04	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu	Tembilahan	UU Nomor 6 Tahun 1965	14 Juni 1965
14.05	Kabupaten Pelalawan	Kabupatan Kampar	Pangkalan Kerinci	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
14.06	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Kampar	Pasir Pangaraian	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
14.07	Kabupaten Rokan Hilir	Kahumatan Banakalia	Ujung Tanjung	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
14.08	Kabupaten Siak	Kabupaten Bengkalis	Siak Sri Indrapura	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
14.09	Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten Indragiri Hulu	Teluk Kuantan	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
14.10	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Bengkalis	Selat Panjang	UU Nomor 12 Tahun 2009	16 anuari 2009
14.71	Kota Pekanbaru			UU Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
14.72	Kota Dumai ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Dumai berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1979)	Kabupaten Bengkalis		UU Nomor 16 Tahun 1999	4 Oktober 1999
15.	PROVINSI JAMBI	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Jambi	Nomor 61 Tahun 1958	25 Juli 1958
15.01	Kabupaten Kerinci		Siulak (Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2011, sebelumnya berkedudukan di Kota Sungai Penuh)	UU Nomor 58 Tahun 1958	17 Juli 1958
15.02	Kabupaten Merangin (UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Salorangun Bangko)		Bangko	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
15.03	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Merangin	Sarolangun	UU Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
15.04	Kabupaten Batang Hari		Muara Bulian (PP Nomor 12 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kenali Asem)	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
15.05	Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten Batang Hari	Sengiti	UU Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
15.06	Kabupaten Tanjung Jabung Barat		Kuala Tungkal	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2 (IIII Name 54 Takes 1000 askalana	3	4	5	6
	(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Tanjung Jabung)				
15.07	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Muarasabak	UU Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
15.08	Kabupaten Bungo (UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Bungo Tebo)		Muaro Bungo	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
15.09	Kabupaten Tebo	Kabupaten Bungo	Tebo	UU Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
15.71	Kota Jambi			UU Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956
15.72	Kota Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci		UU Nomor 25 Tahun 2008	1 Juli 2008
16.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PROVINSI SUMATERA	Palembang	UU Nomor 25 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.01	Kabupaten Ogan Komering Ulu		Baturaja	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.02	Kabupaten Ogan Komering Ilir		Kayuagung	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.03	Kabupaten Muara Enim		Muara Enim	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.04	Kabupaten Lahat		Lahat	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.05	Kabupaten Musi Rawas		Muara Beliti (PP Nomor 46 Tahun 2005, sebelumnya di berkedudukan Kota Lubuk Linggau)	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.06	Kabupaten Musi Banyuasin		Sekayu (SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Des. 52/2/37-34 tanggal 1 April 1963, sebelumnya berkedudukan di Kota Palembang)	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.07	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin	Pangkalan Balai	UU Nomor 6 Tahun 2002	10 April 2002
16.08	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		Martapura	UU Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
16.09	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Muaradua	UU Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
16.10	Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Indralaya	UU Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
16.11	Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten Lahat	Tebing Tinggi	UU Nomor 1 Tahun 2007	2 Januari 2007

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
16.12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten Muara Enim	Talang Ubi	UU Nomor 7 Tahun 2013	11 anuari 2013
16.13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas	Muara Rupit	UU Nomor 16 Tahun 2013	10 Juli 2013
16.71	Kota Palembang			UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
16.72	Kota Pagar Alam ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Pagar Alam berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 1991)	Kabupaten Lahat		UU Nomor 8 Tahun 2001	21 Juni 2001
16.73	Kota Lubuk Linggau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lubuk Linggau berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1981)	Kabupaten Musi Rawas		UU Nomor 7 Tahun 2001	21 Juni 2001
16.74	Kota Prabumulih ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Prabumulih berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1982)	Kabupaten Muara Enim		UU Nomor 6 Tahun 2001	21 Juni 2001
17.	PROVINSI BENGKULU	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Bengkulu	UU Nomor 9 tahun 1967	12 September 1967
17. 17.01	PROVINSI BENGKULU Kabupaten Bengkulu Selatan	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Bengkulu Teluk Betung	UU Nomor 9 tahun 1967 UU Nomor 28 Tahun 1959	12 September 1967 26 Juni 1959
		PROVINSI SUMATERA SELATAN			•
17.01	Kabupaten Bengkulu Selatan	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Teluk Betung	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
17.01 17.02	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong		Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959 26 Juni 1959
17.01 17.02 17.03	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara	PROVINSI SUMATERA SELATAN Kabupaten Bengkulu Selatan	Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu)	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959
17.01 17.02 17.03	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur		Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu) Bintuha	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 3 Tahun 2003	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 25 Februari 2003
17.01 17.02 17.03 17.04 17.05	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara	Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu) Bintuha Tais	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 3 Tahun 2003	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 25 Februari 2003 25 Februari 2003
17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko-Muko	- Kabupaten Bengkulu Selatan	Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu) Bintuha Tais Muko-Muko	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 3 Tahun 2003	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 25 Februari 2003 25 Februari 2003 25 Februari 2003
17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Lebong	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara	Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu) Bintuha Tais Muko-Muko Tubei	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 3 Tahun 2003	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 25 Februari 2003 25 Februari 2003 25 Februari 2003 18 Desember 2003
17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong	Teluk Betung Curup Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu) Bintuha Tais Muko-Muko Tubei Kepahiang	UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 28 Tahun 1959 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 3 Tahun 2003 UU Nomor 39 Tahun 2003 UU Nomor 39 Tahun 2003	26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 26 Juni 1959 25 Februari 2003 25 Februari 2003 25 Februari 2003 18 Desember 2003 18 Desember 2003

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	(PP Nomor 24 Tahun 1983,	5	6
			sebelumnya bernama Kota Tanjung Karang-Teluk Betung)		
18.01	Kabupaten Lampung Selatan		Kalianda (PP Nomor 39 Tahun 1981, sebelumnya berkedudukan di Kota Tanjung Karang-Teluk Betung)	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
18.02	Kabupaten Lampung Tengah		Gunung Sugih (UU Nomor 12 Tahun 1999, sebelumnya di berkedudukan Kota Metro)	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
18.03	Kabupaten Lampung Utara		Kotabumi	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
18.04	Kabupaten Lampung Barat	Kahamatan Lamanan Illiana	Lima	UU Nomor 6 Tahun 1991	16 Agustus 1991
18.05	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Lampung Utara	Menggala	UU Nomor 2 Tahun 1997	3 Januari 1997
18.06	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Lampung Selatan	Kota Agung	UU Nomor 2 Tahun 1997	3 Januari 1997
18.07	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Lampung Tengah	Sukadana	UU Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
18.08	Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Lampung Utara	Blambangan Umpu	UU Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
18.09	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan	Gedong Tataan	UU Nomor 33 Tahun 2007	14 Agustus 2007
18.10	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Tanggamus	Pringsewu	UU Nomor 48 Tahun 2008	26 November 2008
18.11	Kabupaten Mesuji	Kahusahan Tulanghannan	Sidomulyo	UU Nomor 49 Tahun 2008	26 November 2008
18.12	Kabupaten Tulangbawang Barat	Kabupaten Tulangbawang	Panarangan	UU Nomor 50 Tahun 2008	26 November 2008
18.13	Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten Lampung Barat	Krui	UU Nomor 22 Tahun 2012	17 November 2012
18.71	Kota Bandar Lampung			UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
18.72	Kota Metro ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Metro berdasarkan PP No. 34 Tahun 1986)	Kabupaten Lampung Tengah		UU Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
19.	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Pangkal Pinang	UU Nomor 27 Tahun 2000	4 Desember 2000
19.01	Kabupaten Bangka		Sungailiat	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	(PP Nomor 12 Tahun 1971, sebelumnya berkedudukan di Kota Pangkal Pinang)	5	6
19.02	Kabupaten Belitung		Tanjung Pandan	UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
19.03	Kabupaten Bangka Selatan		Toboali	UU Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
19.04	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka	Koba	UU Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
19.05	Kabupaten Bangka Barat		Mentok	UU Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
19.06	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten Belitung	Manggar	UU Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
19.71	Kota Pangkal Pinang			UU Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
21.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PROVINSI RIAU	Tanjung Pinang	UU Nomor 25 Tahun 2002	25 Oktober 2002
21.01	Kabupaten Bintan (PP Nomor 5 Tahun 2006, sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau)		Bandar Seri Bentan (PP Nomor 38 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Tanjung Pinang)	UU Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
21.02	Kabupaten Karimun		Tanjng Balai Karimun	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
21.03	Kabupaten Natuna	Kabupaten Bintan	Ranai	UU Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
21.04	Kabupaten Lingga		Daik Lingga	UU Nomor 31 Tahun 2003	18 Desember 2003
21.05	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Natuna	Siantan	UU Nomor 33 Tahun 2008	21 Juli 2008
21.71	Kota Batam			UU Nomor 53 tahun 1999	4 Oktober 1999
21.72	Kota Tanjung Pinang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tanjung Pinang berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1983)	Kabupaten Bintan		UU Nomor 5 Tahun 2001	21 Juni 2001
	Total daerah otonom di Pulau Sumate - 10 provinsi - 120 kabupaten - 34 kota	ra:			
31.	PROVINSI DKI JAKARTA		Jakarta	UU Nomor 1 Tahun 1956	7 Februari 1956
31.01	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu ***	Kota Administratif Jakarta Utara	Pulau Pramuka	PP Nomor 55 Tahun 2001	3 Juli 2001



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
31.71	Kota Administratif Jakarta Pusat ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
31.72	Kota Administratif Jakarta Utara ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
31.73	Kota Administratif Jakarta Barat ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
31.74	Kota Administratif Jakarta Selatan ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
31.75	Kota Administratif Jakarta Timur ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
32.	PROVINSI JAWA BARAT		Bandung	UU Nomor 11 Tahun 1950	4 Juli 1950
32.01	Kabupaten Bogor		Cibinong (PP Nomor 6 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Bogor)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.02	Kabupaten Sukabumi		Pelabuhan Ratu (PP Nomor 66 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Sukabumi)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.03	Kabupaten Cianjur		Cianjur	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.04	Kabupaten Bandung		Soreang (PP Nomor 2 Tahun 1986, sebelumnya berkedudukan di Kota Bandung)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.05	Kabupaten Garut		Garut	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.06	Kabupaten Tasikmalaya		Singaparna (PP Nomor 30 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Tasikmalaya)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.07	Kabupaten Ciamis		Ciamis	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.08	Kabupaten Kuningan		Kuningan	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.09	Kabupaten Cirebon		Sumber (PP Nomor 33 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Cirebon)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
32.10	Kabupaten Majalengka		Majalengka	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.11	Kabupaten Sumedang		Sumedang	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.12	Kabupaten Indramayu		Indramayu	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.13	Kabupaten Subang	Kabupaten Cianjur	Subang	UU Nomor 4 Tahun 1968	29 Juni 1968
32.14	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Karawang	Purwakarta	UU Nomor 4 Tahun 1968	29 Juni 1968
32.15	Kabupaten Karawang		Karawang	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.16	Kabupaten Bekasi		Cikarang (PP Nomor 82 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Bekasi)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
32.17	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung	Ngamprah	UU Nomor 12 Tahun 2007	2 Januari 2007
32.18	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Ciamis	Parigi	UU Nomor 21 Tahun 2012	17 November 2012
32.71	Kota Bogor			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
32.72	Kota Sukabumi			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
32.73	Kota Bandung			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
32.74	Kota Cirebon			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
32.75	Kota Bekasi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bekasi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 1981)	Kabupaten Bekasi		UU Nomor 9 Tahun 1996	16 Desember 1996
32.76	Kota Depok ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Depok berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1981)	Kabupaten Bogor		UU Nomor 15 Tahun 1999	20 April 1999
32.77	Kota Cimahi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cimahi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975)	Kabupaten Bandung		UU Nomor 9 Tahun 2001	21 Juni 2001
32.78	Kota Tasikmalaya **	Kabupaten Tasikmalaya		UU Nomor 10 Tahun 2001	21 Juni 2001

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	(Sebelumnya adalah Kota Administratif Tasikmalaya berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1976)				
32.79	Kota Banjar ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Banjar berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1991)	Kabupaten Ciamis		UU Nomor 27 Tahun 2002	25 Oktober 2002
33.	PROVINSI JAWA TENGAH		Semarang	UU Nomor 10 Tahun 1950	4 Juli 1950
33.01	Kabupaten Cilacap		Cilacap	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.02	Kabupaten Banyumas		Purwokerto	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.03	Kabupaten Purbalingga		Purbalingga	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.04	Kabupaten Banjarnegara		Banjarnegara	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.05	Kabupaten Kebumen		Kebumen	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.06	Kabupaten Purworejo		Purworejo	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.07	Kabupaten Wonosobo		Wonosobo	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.08	Kabupaten Magelang		Mungkid (PP Nomor 21 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Magelang)	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.09	Kabupaten Boyolali		Boyolali	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.10	Kabupaten Klaten		Klaten	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.11	Kabupaten Sukoharjo		Sukoharjo	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.12	Kabupaten Wonogiri		Wonogiri	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.13	Kabupaten Karanganyar		Karanganyar	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.14	Kabupaten Sragen		Sragen	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.15	Kabupaten Grobogan		Purwodadi	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.16	Kabupaten Blora		Blora	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.17	Kabupaten Rembang		Rembang	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
33.18	Kabupaten Pati		Pati	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.19	Kabupaten Kudus		Kudus	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.20	Kabupaten Jepara		Jepara	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.21	Kabupaten Demak		Demak	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.22	Kabupaten Semarang		Ungaran (PP Nomor 29 Tahun 1983, sebelumnya berkedudukan di Kota Semarang)	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.23	Kabupaten Temanggung		Temanggung	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.24	Kabupaten Kendal		Kendal	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.25	Kabupaten Batang	Kabupaten Pekalongan	Batang	UU Nomor 9 Tahun 1965	14 Juni 1965
33.26	Kabupaten Pekalongan		Kajen (PP Nomor 48 Tahun 1986, sebelumnya berkedudukan di Kota Pekalongan)	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.27	Kabupaten Pemalang		Pemalang	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.28	Kabupaten Tegal		Slawi (PP Nomor 2 Tahun 1984, sebelumnya berkedudukan di Kota Tegal)	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.29	Kabupaten Brebes		Brebes	UU Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
33.71	Kota Magelang			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
33.72	Kota Surakarta			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
33.73	Kota Salatiga			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
33.74	Kota Semarang			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
33.75	Kota Pekalongan			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
33.76	Kota Tegal			UU Nomor 13 Tahun 1954	12 Agustus 1950

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
<u> </u>	PROVINSI DI YOGYAKARTA	<u>3</u>	Yogyakarta	UU Nomor 3 Tahun 1950	6 3 Maret 1950
34.01			Sentolo	UU Nomor 18 Tahun 1951	12 Oktober 1951
34.02	Kabupaten Bantul		Bantul	UU Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
34.03	Kabupaten Gunungkidul		Wonosari	UU Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
34.04	Kabupaten Sleman		Sleman	UU Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
34.71	Kota Yogyakarta			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.	PROVINSI JAWA TIMUR		Surabaya	UU Nomor 2 Tahun 1950	Maret 1950
35.01	Kabupaten Pacitan		Pacitan	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.02	Kabupaten Ponorogo		Ponorogo	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.03	Kabupaten Trenggalek		Trenggalek	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.04	Kabupaten Tulungagung		Tulungagung	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.05	Kabupaten Blitar		Kanigoro (PP Nomor 3 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Blitar)	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.06	Kabupaten Kediri		Kediri	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.07	Kabupaten Malang		Kepanjen (PP Nomor 18 Tahun 2008, sebelumnya berkedudukan di Kota Malang)	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.08	Kabupaten Lumajang		Lumajang	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.09	Kabupaten Jember		Jember	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.10	Kabupaten Banyuwangi		Banyuwangi	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.11	Kabupaten Bondowoso		Bondowoso	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
35.12	Kabupaten Situbondo (PP Nomor 28 Tahun 1972, sebelumnya bernama Kabupaten Panarukan)		Situbondo	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.13	Kabupaten Probolinggo		Kraksaan (PP Nomor 2 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Probolinggo)	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.14	Kabupaten Pasuruan		Bangil (PP Nomor 27 Tahun 2016, sebelumnya berkedudukan di Kota Pasuruan)	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.15	Kabupaten Sidoarjo		Sidoarjo	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.16	Kabupaten Mojokerto		Mojokerto	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.17	Kabupaten Jombang		Jombang	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.18	Kabupaten Nganjuk		Nganjuk	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.19	Kabupaten Madiun		Caruban (PP Nomor 3 Tahun 2019, sebelumnya bernama Mejayan berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Madiun)	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.20	Kabupaten Magetan		Magetan	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.21	Kabupaten Ngawi		Ngawi	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.22	Kabupaten Bojonegoro		Bojonegoro	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.23	Kabupaten Tuban		Tuban	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.24	Kabupaten Lamongan		Lamongan	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.25	Kabupaten Gresik (PP Nomor 38 Tahun 1974, sebelumnya bernama Kabupaten Surabaya)		Gresik	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.26	Kabupaten Bangkalan		Bangkalan	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.27	Kabupaten Sampang		Sampang	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.28	Kabupaten Pamekasan		Pemekasan	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
35.29	Kabupaten Sumenep		Sumenep	UU Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
35.71	Kota Kediri			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.72	Kota Blitar			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.73	Kota Malang			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.74	Kota Probolinggo			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.75	Kota Pasuruan			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.76	Kota Mojokerto			UU Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.77	Kota Madiun			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.78	Kota Surabaya			UU Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
35.79	Kota Batu ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Batu berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1993)	Kabupaten Malang		UU Nomor 11 Tahun 2001	21 Juni 2001
36.	PROVINSI BANTEN	PROVINSI JAWA BARAT	Serang	UU Nomor 23 Tahun 2000	17 Okt 2000
36.01	Kabupaten Pandeglang		Pandeglang	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
36.02	Kabupaten Lebak		Rangkasbitung	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
36.03	Kabupaten Tangerang		Tigaraksa (PP Nomor 14 Tahun 1995, sebelumnya berkedudukan di Kota Tangerang)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
36.04	Kabupaten Serang		Ciruas (PP Nomor 32 Tahun 2012, sebelumnya berkedudukan di Kota Serang)	UU Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
36.71	Kota Tangerang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tangerang berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 1981)	Kabupaten Tangerang		UU Nomor 2 Tahun 1993	27 Februari 1993
36.72	Kota Cilegon ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cilegon berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1983)	Kabupaten Serang		UU Nomor 15 Tahun 1999	20 April 1999

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
36.73	Kota Serang	Kabupaten Serang		UU Nomor 32 Tahun 2007	14 Agustus 2007
36.74	Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Tangerang		UU Nomor 51 Tahun 2008	26 November 2008
	Total daerah otonom di Pulau Jawa: - 6 provinsi - 83 kabupaten - 29 kota				
51.	PROVINSI BALI	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Denpasar (Kep. Mendagri & Otda Nomor Des 52/2/36-136, sebelumnya berkedudukan di Singaraja)	UU Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958
51.01	Kabupaten Jembrana		Negara	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.02	Kabupaten Tabanan		Tabanan	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.03	Kabupaten Badung		Mengwi (PP Nomor 67 Tahun 2009, sebelumnya berkedudukan di Kota Denpasar)	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.04	Kabupaten Gianyar		Gianyar	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.05	Kabupaten Klungkung		Klungkung	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.06	Kabupaten Bangli		Bangli	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.07	Kabupaten Karangasem		Amlapura (Kep. Mendagri Nomor 284 Tahun 1970, sebelumnya bernama Karangasem)	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.08	Kabupaten Buleleng		Singaraja	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
51.71	Kota Denpasar ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Denpasar berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1978)	Kabupaten Badung		UU Nomor 1 Tahun 1992	15 Januari 1992
52.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Mataram	UU Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
52.01	Kabupaten Lombok Barat		Gerung (PP Nomor 62 Tahun 2000, sebelumnya berkedudukan di Kota Mataram)	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.02	Kabupaten Lombok Tengah		Praya	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.03	Kabupaten Lombok Timur		Selong	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.04	Kabupaten Sumbawa		Sumbawa Besar	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.05	Kabupaten Dompu		Dompu	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.06	Kabupaten Bima		Woha (PP Nomor 31 Tahun 2008, sebelumnya berkedudukan di Kota Bima)	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Sumbawa	Taliwang	UU Nomor 30 Tahun 2003	18 Desember 2003
52.08	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Barat	Tanjung	UU Nomor 26 Tahun 2008	21 Juli 2008
52.71	Kota Mataram ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Mataram berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1978)	Kabupaten Lombok Barat		UU Nomor 1 Tahun 1992	15 Januari 1992
52.72	Kota Bima ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bima berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 1998)	Kabupaten Bima		UU Nomor 13 tahun 2002	10 April 2002
53.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Kupang	UU Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958
53.01	Kabupaten Kupang		Oelamasi (PP Nomor 3 Tahun 2006, sebelumnya berkedudukan di Kota Kupang)	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.02	Kabupaten Timor Tengah Selatan		So'e	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.03	Kabupaten Timor Tengah Utara		Kafemenanu	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
53.04	Kabupaten Belu		Atambua	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.05	Kabupaten Alor		Kalabahi	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.06	Kabupaten Flores Timur		Larantuka	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.07	Kabupaten Sikka		Maumere	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.08	Kabupaten Ende		Ende	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.09	Kabupaten Ngada		Bajawa	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.10	Kabupaten Manggarai		Ruteng	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.11	Kabupaten Sumba Timur		Waingapu	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.12	Kabupaten Sumba Barat		Waikabubak	UU Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
53.13	Kabupaten Lembata	Kabupaten Flores Timur	Lewoleba	UU Nomor 52 tahun 1999	4 Oktober 1999
53.14	Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten Kupang	Ba'a	UU Nomor 9 Tahun 2002	10 April 2002
53.15	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai	Labuan Bajo	UU Nomor 8 Tahun 2003	25 Februari 2003
53.16	Kabupaten Nagekeo	Kabupaten Ngada	Mbay	UU Nomor 2 Tahun 2007	2 Januari 2007
53.17	Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten Sumba Tengah	Waibakul	UU Nomor 3 Tahun 2007	2 Januari 2007
53.18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten Sumba Barat	Tambolaka	UU Nomor 16 Tahun 2007	2 Januari 2007
53.19	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai	Borong	UU Nomor 36 Tahun 2007	14 Agustus 2007
53.20	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Kupang	Mania	UU Nomor 52 Tahun 2008	26 Nov 2008
53.21	Kabupaten Malaka	Kabupaten Belu	Betun	UU Nomor 3 Tahun 2013	11 Januari 2013
53.71	Kota Kupang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Kupang berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1978)	Kabupaten Kupang		UU Nomor 5 Tahun 1996	11 April 1996
	Total daerah otonom di Kepulauan Nu - 3 provinsi - 37 kabupaten - 4 kota	sa Tenggara:			
61.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PROVINSI KALIMANTAN	Pontianak	UU Nomor 25 Tahun 1956	29 ovember 1956
61.01	Kabupaten Sambas		Sambas	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4 . (SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Des 52/2/36-33, sebelumnya berkedudukan di Sambas) - (UU Nomor 12 Tahun 2001, sebelumnya berkedudukan di Kota Singkawang)	5	6
61.02	Kabupaten Mempawah (Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2014, sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak)		Mempawah (SK Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/9- 11, sebelumnya berkedudukan di Kota Pontianak)	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.03	Kabupaten Sanggau		Sanggau	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.04	Kabupaten Ketapang		Ketapang	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.05	Kabupaten Sintang		Sintang	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.06	Kabupaten Kapuas Hulu		Putusibau	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.07	Kabupaten Bengkayang	Kabupaten Sambas	Bengkayang	UU Nomor 10 Tahun 1999	20 April 1999
61.08	Kabupaten Landak	Kabupaten Pontianak	Ngabang	UU Nomor 55 Tahun 1999	4 Oktober 1999
61.09	Kabupaten Sekadau	Kabupaten Sanggau	Sekadau	UU Nomor 34 Tahun 2003	18 Desember 2003
61.10	Kabupaten Melawi	Kabupaten Sintang	Nanga Pinoh	UU Nomor 34 Tahun 2003	18 Desember 2003
61.11	Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Ketapang	Sukadana	UU Nomor 6 Tahun 2007	2 Januari 2007
61.12	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Pontianak	Sungai Raya	UU Nomor 35 Tahun 2007	14 Agustus 2007
61.71	Kota Pontianak			UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
61.72	Kota Singkawang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Singkawang berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 1981)	Kabupaten Bengkayang		UU Nomor 12 Tahun 2001	21 Juni 2001
62.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Palangkaraya (Keputusan Mendagri dan Otda Nomor Des. 52/1/2-206, sebelumnya berkedudukan di Kota Banjarmasin)	UU Nomor 21 Tahun 1958	17 Juni 1958

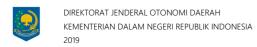
KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
62.01	Kabupaten Kotawaringin Barat		Pangkalan Bun	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
62.02	Kabupaten Kotawaringin Timur		Sampit	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
62.03	Kabupaten Kapuas		Kuala Kapuas	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
62.04	Kabupaten Barito Selatan		Buntok	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
62.05	Kabupaten Barito Utara		Muara Teweh	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
62.06	Kabupaten Katingan	Kabupatan Katawaringin Timur	Kasongan	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.07	Kabupaten Seruyan	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kuala Pembuang	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.08	Kabupaten Sukamara	Kabupaten Kotawaringin Barat	Sukamara	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.09	Kabupaten Lamandau	Rabupaten Kotawanngin barat	Nanga Bulik	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.10	Kabupaten Gunung Mas	Kahupatan Kanuas	Kuala Kurun	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.11	Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Kapuas	Pulang Pisau	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.12	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten Barito Utara	Puruk Cahu	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.13	Kabupaten Barito Timur	Kabupaten Barito Selatan	Tamiang Layang	UU Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
62.71	Kota Palangkaraya	Kabupaten Kapuas		UU Nomor 5 Tahun 1965	14 Juni 1965
63.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PROVINSI KALIMANTAN	Banjarmasin	UU Nomor 25 Tahun 1956	29 November 1956
63.01	Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Banjar Baru	Pleihari	UU Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965
63.02	Kabupaten Kotabaru		Kotabaru	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.03	Kabupaten Banjar Baru (UU Nomor 8 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Banjar)		Martapura	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.04	Kabupaten Barito Kuala		Marabahan	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.05	Kabupaten Tapin	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rantau	UU Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965
63.06	Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Kandangan	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.07	Kabupaten Hulu Sungai Tengah		Barabai	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.08	Kabupaten Hulu Sungai Utara		Amuntai	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.09	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tanjung	UU Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
63.10	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Kotabaru	Batulicin	UU Nomor 2 Tahun 2003	25 Februari 2003
63.11	Kabupaten Balangan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Paringin	UU Nomor 2 Tahun 2003	25 Februari 2003
63.71	Kota Banjarmasin			UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
63.72	Kota Banjarbaru ** (sebelumnya adalah Kota Administratif Banjarbaru berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 1975)	Kabupaten Banjar Baru		UU Nomor 9 Tahun 1999	10 April 1999
64.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PROVINSI KALIMANTAN	Samarinda	UU Nomor 25 Tahun 1956	29 November 1956
64.01	Kabupaten Paser (PP Nomor 49 Tahun 2007, sebelumnya bernama Kabupaten Pasir)		Tana Paser (PP Nomor 7 Tahun 2013, sebelumnya bernama Tanah Grogot)	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara (PP Nomor 8 Tahun 2002, sebelumnya bernama Kabupaten Kutai)		Tenggarong (Keputusan Mendagri Nomor Des. 52/6/44, sebelumnya berkedudukan di Kota Samarinda)	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
64.03	Kabupaten Berau		Tanjung Redep	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
64.04	Kabupaten Kutai Barat	K-h	Sendawar	UU Nomor 47 Tahun 1999	4 Oktober 1999
64.05	Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten Kutai	Sanggata	UU Nomor 47 Tahun 1999	4 Oktober 1999
64.06	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten Paser	Penajam	UU Nomor 7 Tahun 2002	10 April 2002
64.07	Kabupaten Mahakam Ulu	Kabupaten Kutai Barat	Long Bagun	UU Nomor 2 Tahun 2013	11 Januari 2013
64.71	Kota Balikpapan			UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
64.72	Kota Samarinda			UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
64.73	Kota Bontang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bontang berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989)	Kabupaten Kutai		UU Nomor 47 Tahun 1999	
65.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Tanjung Selor	UU Nomor 20 Tahun 2012	17 November 2012

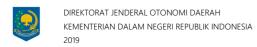
KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	
65.01	Kabupaten Bulungan		Tanjung Selor	UU Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959	
65.02	Kabupaten Malinau		Malinau	UU Nomor 47 Tahun 1999	4 Oktober 1999	
65.03	Kabupaten Nunukan		Nunukan	UU Nomor 47 Tahun 1999	4 Oktober 1999	
65.04	Kabupaten Tana Tidung		Tideng Pale	UU Nomor 34 Tahun 2007	14 Agustus 2007	
65.71	Kota Tarakan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tarakan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 1981)	Kabupaten Bulungan		UU Nomor 29 Tahun 1997	8 Oktober 1997	
	Total daerah otonom di Pulau Kalimantan: - 5 provinsi - 47 kabupaten - 9 kota					

71.	PROVINSI SULAWESI UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH	Manado	UU Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
71.01	Kabupaten Bolaang Mongondow		Lolak (PP Nomor 9 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Kotamobagu)	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
71.02	Kabupaten Minahasa		Tondano	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
71.03	Kabupaten Kepulauan Sangihe (PP Nomor 59 Tahun 2014, sebelumnya bernama Kabupaten Sangihe dan Talaud)		Tahuna	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
71.04	Kabupaten Kepulauan Talaud	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Melonguane	UU Nomor 8 Tahun 2002	10 April 2002
71.05	Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten Minahasa	Amurang	UU Nomor 10 Tahun 2003	25 Februari 2003
71.06	Kabupaten Minahasa Utara	карирасен ічінанаѕа	Airmadidi	UU Nomor 33 Tahun 2003	18 Desember 2003
71.07	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten Minahasa Selatan	Ratahan	UU Nomor 9 Tahun 2007	2 Januari 2007
71.08	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	Boroko	UU Nomor 10 Tahun 2007	2 Januari 2007
71.09	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Ondong Siau	UU Nomor 15 Tahun 2007	2 Januari 2007
71.10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow	Tutuyan	UU Nomor 29 Tahun 2008	21 Juli 2008



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
71.11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		Bolang Uki	UU Nomor 30 Tahun 2008	21 Juli 2008
71.71	Kota Manado			UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
71.72	Kota Bitung ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bitung berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1975)	Kabupaten Minahasa		UU Nomor 7 Tahun 1990	15 Agustus 1950
71.73	Kota Tomohon			UU Nomor 10 Tahun 2003	25 Februari 2003
71.74	Kota Kotamobagu	Kabupaten Bolaang Mongodow		UU Nomor 4 Tahun 2007	2 Januari 2007
72.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH	Palu	UU Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
72.01	Kabupaten Banggai		Luwuk	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
72.02	Kabupaten Poso		Poso	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
72.03	Kabupaten Donggala		Benawa (PP Nomor 71 Tahun 1999, sebelumnya berkedudukan di Kota Palu)	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
72.04	Kabupaten Toli-Toli (UU Nomor 51 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli)		Toil-Toli	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
72.05	Kabupaten Buol	Kabupaten Buol Toli-Toli	Buol	UU Nomor 51 Tahun 1999	4 Oktober 1999
72.06	Kabupaten Morowali	Kabupaten Poso	Bungku	UU Nomor 51Tahun 1999	4 Oktober 1999
72.07	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai	Salakan	UU Nomor 51 Tahun 1999	4 Oktober 1999
72.08	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten Donggala	Parigi	UU Nomor 10 Tahun 2002	10 April 2002
72.09	Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten Poso	Ampana	UU Nomor 32 Tahun 2003	18 Desember 2003
72.10	Kabupaten Sigi	Kabupaten Donggala	Sigi Biromaru	UU Nomor 27 Tahun 2008	21 Juli 2008
72.11	Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten Banggai Kepulauan	Banggai	UU Nomor 6 Tahun 2013	11 Januari 2013
72.12	Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten Morowali	Kolonodale	UU Nomor 12 Tahun 2013	15 Mei 2013
72.71	Kota Palu ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Palu berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1978)	Kabupaten Donggala		UU Nomor 4 Tahun 1994	22 Juli 1994
73.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN- TENGGARA	Makassar	UU Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
			(PP Nomor 86 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kota Ujung Pandang)		
73.01	Kabupaten Kepulauan Selayar (PP Nomor 59 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Selayar)		Benteng	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.02	Kabupaten Bulukumba		Bulukumba	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.03	Kabupaten Bantaeng		Bantaeng	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.04	Kabupaten Jeneponto		Jeneponto	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.05	Kabupaten Takalar		Takalar	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.06	Kabupaten Gowa		Sunggomimasa	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.07	Kabupaten Sinjai		Sinjai	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.08	Kabupaten Bone		Watampone	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.09	Kabupaten Maros		Maros	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.10	Kabupaten Pangkajene Kepulauan		Pangkajene	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.11	Kabupaten Barru		Barru	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.12	Kabupaten Soppeng		Watansoppeng	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.13	Kabupaten Wajo		Sengkang	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.14	Kabupaten Sidenreng Rappang		Sidenreng	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.15	Kabupaten Pinrang		Pinrang	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.16	Kabupaten Enrekang		Enrekang	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.17	Kabupaten Luwu		Belopa	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.18	Kabupaten Tana Toraja		Makale	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
73.19	Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten Luwu	Masamba	UU Nomor 13 Tahun 1999	20 April 1999
73.20	Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Luwu Utara	Malili	UU Nomor 7 Tahun 2003	25 Februari 2003
73.21	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Tana Toraja	Rantepao	UU Nomor 28 Tahun 2008	21 Juli 2008
73.71	Kota Makassar (PP Nomor 86 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kota Ujung Pandang)			UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1 72 72	2	3	4	5	6
73.72	Kota Pare-Pare Kota Palopo ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Palopo berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1986)	Kabupaten Luwu		UU Nomor 29 Tahun 1959 UU Nomor 11 Tahun 2002	4 Juli 1959 10 April 2002
74.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PROVINSI SULAWESI SELATAN-TENGGARA	Kendari	UU Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
74.01	Kabupaten Kolaka		Kolaka	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
74.02	Kabupaten Konawe (PP Nomor 26 Tahun 2004, sebelumnya bernama Kabupaten Kendari)		Una Aha (PP Nomor 29 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Kendari)	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
74.03	Kabupaten Muna		Raha	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
74.04	Kabupaten Buton		Pasar Wajo (PP Nomor 29 Tahun 2003, sebelumnya berkedudukan di Kota Bau-Bau)	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
74.05	Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Konawe	Andolo	UU Nomor 4 Tahun 2003	25 Februari 2003
74.06	Kabupaten Bombana	Kabupatan Butan	Rumbia	UU Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
74.07	Kabupaten Wakatobi	Kabupaten Buton	Wangi-Wangi	UU Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
74.08	Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten Kolaka	Lasusua	UU Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
74.09	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten Konawe	Wanggudu	UU Nomor 13 Tahun 2007	2 Januari 2007
74.10	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Muna	Buranga	UU Nomor 14 Tahun 2007	2 Januari 2007
74.11	Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten Kolaka	Tirawuta	UU Nomor 7 Tahun 2013	11 Januari 2013
74.12	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kabupaten Konawe	Langara	UU Nomor 13 Tahun 2013	15 Mei 2013
74.13	Kabupaten Muna Barat	Kabupaten Muna	Laworo	UU Nomor 14 Tahun 2014	23 Juli 2014
74.14	Kabupaten Buton Tengah	K	Labungkari	UU Nomor 15 Tahun 2014	23 Juli 2014
74.15	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten Buton	Batauga	UU Nomor 16 Tahun 2014	23 Juli 2014
74.71	Kota Kendari **	Kabupaten Konawe		UU Nomor 6 Tahun 1995	3 Agustus 1995



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	(Sebelumnya adalah Kota Administratif Kendari berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1978)				
74.72	Kota Bau Bau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bau Bau berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1981)	Kabupaten Buton		UU Nomor 13 Tahun 2001	21 Juni 2001
75.	PROVINSI GORONTALO	PROVINSI SULAWESI UTARA	Gorontalo	UU Nomor 38 Tahun 2000	22 Des 2000
75.01	Kabupaten Gorontalo		Limboto (PP Nomor 30 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Isimu)	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
75.02	Kabupaten Boalemo	Kabumatan Canantala	Tilamuta	UU Nomor 50 Nomor 1999	4 Oktober 1999
75.03	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo	Suwawa	UU Nomor 6 Tahun 2003	25 Februari 2003
75.04	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Boalemo	Marisa	UU Nomor 6 Tahun 2003	25 Februari 2003
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo	Kwandang	UU Nomor 11 Tahun 2007	2 Januari 2007
75.71	Kota Gorontalo			UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
76.	PROVINSI SULAWESI BARAT	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Mamuju	UU Nomor 26 Tahun 2004	5 Oktober 2004
76.01	Kabupaten Mamuju Utara	Kabupaten Mamuju	Pasangkayu	UU Nomor 5 Tahun 2003	25 April 2003
76.02	Kabupaten Mamuju		Mamuju	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
76.03	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Polewali Mamasa	Mamasa	UU Nomor 11 Tahun 2002	10 April 2002
76.04	Kabupaten Majene		Majene	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
76.05	Kabupaten Polewali Mandar (PP Nomor 74 Tahun 2005, sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa)		Polewali	UU Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
76.06	Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten Mamuju	Tobadak	UU Nomor 4 Tahun 2013	11 Januari 2013
	Total daerah otonom di Pulau Sulawes - 6 provinsi - 70 kabupaten - 11 kota	si:			
81.	PROVINSI MALUKU		Ambon	UU Nomor 20 Tahun 1958	17 Juni 1958



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
81.01	Kabupaten Maluku Tengah		Masohi (Keputusan Mendagri & Otda Nomor Des. 52/12/5-207, sebelumnya berkedudukan di Amahai)	UU Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
81.02	Kabupaten Maluku Tenggara		Langgur (PP Nomor 35 Tahun 2011, sebelumnya berkedudukan di Kota Tual)	UU Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
81.03	Kabupaten Kepulauan Tanimbar (PP Nomor 2 Tahun 2019, sebelumnya bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat)	Kabupaten Maluku Tenggara	Saumlaki	UU Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
81.04	Kabupaten Buru		Namlea	UU Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
81.05	Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten Maluku Tengah	Dataran Hunimoa	UU Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
81.06	Kabupaten Seram Bagian Barat		Dataran Honipopu	UU Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
81.07	Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten Maluku Tenggara	Dobo	UU Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
81.08	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Moa	UU Nomor 31 Tahun 2008	21 Juli 2008
81.09	Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten Buru	Namrole	UU Nomor 32 Tahun 2008	21 Juli 2008
81.71	Kota Ambon			UU Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
81.72	Kota Tual	Kabupaten Maluku Tenggara		UU Nomor 31 Tahun 2007	14 Agustus 2007
82.	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU	Sofifi	UU Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
82.01	Kabupaten Halmahera Barat (UU Nomor 1 Tahun 2003, sebelumnya bernama Kabupaten Maluku Utara)		Jailolo (UU Nomor 1 Tahun 2003, sebelumnya berkedudukan di Kota Ternate)	UU Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
82.02	Kabupaten Halmahera Tengah		Soasiu	UU Nomor 6 Tahun 1990	15 Agustus 1990
82.03	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupatan Halmahara Parat	Tobelo	UU Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
82.04	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Barat	Labuha	UU Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
82.05	Kabupaten Kepulauan Sula		Sanana	UU Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
82.06	Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten Halmehera Tengah	Maba	UU Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
82.07	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Halmahera Utara	Daruba	UU Nomor 53 Tahun 2008	26 November 2008



KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
82.08	Kabupaten Pulau Taliabu	Kabupaten Kepulauan Sula	Bobong	UU Nomor 6 Tahun 2013	11 Januari 2013
82.71	Kota Ternate ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Ternate berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1981)	Kabupaten Halmahera Barat		UU Nomor 11 Tahun 1999	20 April 1999
82.72	Kota Tidore Kepulauan	Kabupaten Halmahera Tengah		UU Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
	Total daerah otonom di Kepulauan Ma - 2 provinsi - 17 kabupaten - 4 kota	iluku:			
91.	PROVINSI PAPUA (UU Nomor 21 Tahun 2001, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya)		Jayapura	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.01	Kabupaten Merauke		Merauke	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.02	Kabupaten Jayawijaya		Wamena	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.03	Kabupaten Jayapura		Sentani (PP Nomor 15 Tahun 2000, sebelumnya berkedudukan di Kota Jayapura)	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.04	Kabupaten Nabire (PP Nomor 52 Tahun 1996, sebelumnya bernama Kabupaten Paniai)		Nabire	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.05	Kabupaten Kepulauan Yapen (PP Nomor 40 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Yapen Waropen)		Serui	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.06	Kabupaten Biak Numfor		Biak	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
91.07	Kabupaten Puncak Jaya * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Puncak Jaya berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1996)	Kabupaten Nabire	Enarotali	UU Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
91.08	Kabupaten Paniai *		Mulia	UU Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Paniai berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 1996)				
91.09	Kabupaten Mimika * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Mimika berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1996)	Kabupaten Fak Fak	Timika	UU Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
91.10	Kabupaten Sarmi	Kabupaten Jayapura	Sarmi	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.11	Kabupaten Keerom	карирасен зауарита	Waris	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.12	Kabupaten Pegunungan Bintang		Oksibili	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.13	Kabupaten Yahukimo	Kabupaten Jayawijaya	Sumohai	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.14	Kabupaten Tolikara		Karubaga	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.15	Kabupaten Waropen	Kabupaten Yapen Waropen	Botawa	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.16	Kabupaten Boven Digoel		Tanah Merah	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.17	Kabupaten Mappi	abupaten Merauke	Кері	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.18	Kabupaten Asmat		Asmat	UU Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
91.19	Kabupaten Supiori	Kabupaten Biak Numfor	Sorendiweri	UU Nomor 35 Tahun 2003	18 Desember 2003
91.20	Kabupaten Mamberamo Raya	Kabupaten Sarmi	Barumo	UU Nomor 19 Tahun 2007	15 Maret 2007
91.21	Kabupaten Mamberamo Tengah		Kobakma	UU Nomor 3 Tahun 2008	
91.22	Kabupaten Yalimo	Kabupatan Jayawiiaya	Elelim	UU Nomor 4 Tahun 2008	4 Januari 2008
91.23	Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten Jayawijaya	Tiom	UU Nomor 5 Tahun 2008	
91.24	Kabupaten Nduga		Kenyam	UU Nomor 6 Tahun 2008	
91.25	Kabupaten Puncak	Kabupaten Puncak Jaya	Iilaga	UU Nomor 7 Tahun 2008	4 Januari 2008
91.26	Kabupaten Dogiyai	Kabupaten Nabire	Kigamani	UU Nomor 8 Tahun 2008	
91.27	Kabupaten Intan Jaya	Vahunatan Daniai	Yokatapa	UU Nomor 54 Tahun 2008	26 November 2008
91.28	Kabupaten Deiyai	Kabupaten Paniai	Waghete	UU Nomor 55 Tahun 2008	26 November 2008
91.71	Kota Jayapura **	Kabupaten Jayapura		UU Nomor 6 Tahun 1993	2 Agustus 1993

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	(Sebelumnya adalah Kota Administratif Jayapura berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 1979)	3	4	5	6
92.	PROVINSI PAPUA BARAT (PP Nomor 24 Tahun 2007, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat)	PROVINSI PAPUA	Manokwari	UU Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
92.01	Kabupaten Sorong		Sorong	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
92.02	Kabupaten Manokwari		Manokwari	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
92.03	Kabupaten Fak Fak		Fak-Fak	UU Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
92.04	Kabupaten Sorong Selatan	Kaharatan Carata	Teminabuan	UU Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
92.05	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Sorong	Waisai	UU Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
92.06	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten Manokwari	Bintuni	UU Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
92.07	Kabupaten Teluk Wondama		Rasiei	UU Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
92.08	Kabupaten Kaimana	Kabupaten Fak Fak	Kaimana	UU Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
92.09	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Sorong & Manokwari	Fef	UU Nomor 56 Tahun 2008	26 November 2008
92.10	Kabupaten Maybrat	Kabupaten Sorong	Kumurkek	UU Nomor 13 Tahun 2009	16 januari 2009
92.11	Kabupaten Manokwari Selatan	Kabupatan Manalayayi	Boundij	UU Nomor 23 Tahun 2012	17 November 2012
92.12	Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten Manokwari	Ullong	UU Nomor 24 Tahun 2012	17 November 2012
92.71	Kota Sorong ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Sorong berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1996)	Kabupaten Sorong		UU Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	Total daerah otonom di Pulau Papua: - 2 provinsi - 40 kabupaten - 2 kota				
	PROVINSI TIMOR TIMUR **** (Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 1999 dan berdasarkan TAP MPR-RI Nomor V/MPR 1999		DILI	UU Nomor 7 tahun 1976	17 Juli 1976

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	DAERAH INDUK	IBUKOTA	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur, Provinsi Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)				
	Kabupaten Dili ****		Dili	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Baucau ****		Baucau	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Manatuto ****		Manatuto	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Lautem ****		Lautem	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Viqueque ****		Viqueque	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Ainaro ****		Ainaro	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Manufahi ****		Same	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Cova-Lima ****		Suai	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Ambeno ****		Pante Macassar	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Bobonaro ****		Maliana	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Liquiça ****		Liquiça	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Ermera ****		Ermera	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	Kabupaten Aileu ****		Aileu	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976

Jumlah daerah di Indonesia sebanyak 548, terdiri atas:

- 34 provinsi;
- 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta); dan
- 98 kota (termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).

Keterangan:

- * Peningkatan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Otonom.
- ** Peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom.
- *** Bukan merupakan daerah otonom.
- **** Tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia.

